



## POLA KOMUNIKASI PEMERINTAH KAMPUNG DALAM PEMBANGUNAN KAMPUNG AUTAKMA DISTRIK WAMENA KOTA KABUPATEN JAYAWIJAYA

**Siti Khikmatul Rizqi<sup>1</sup>, Irmayani Misrah<sup>2</sup>, Yorena Wenda<sup>3</sup>**

Ilmu Pemerintahan<sup>1</sup>, Administrasi Publik<sup>2,3</sup>, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena  
Jl. Yos Sudarso Wamena Jayawijaya Papua, Indonesia

Email Korespondensi: khikmatulrizqi@gmail.com

### Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Pola Komunikasi Pemerintah Kampung Dalam Pembangunan Kampung Autakma, Distrik Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penentuan sumber data yang digunakan yaitu dengan mengambil teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam berkomunikasi dengan masyarakat pemerintah menggunakan bahasa Indonesia, namun lebih sering menggunakan bahasa daerah. Teknologi digunakan seperti komputer, lewat telfon, lewat Whatssap dan jaringan internet. Media yang digunakan untuk berkomunikasi yaitu HP, lewat Whatssap, melalui surat menyurat, dan melalui secara lisan langsung kepada masyarakat. Hambatan yaitu: 1. Kurangnya komunikasi dengan bawahan atau aparatur kampung. 2. Kurangnya komunikasi dengan masyarakat setempat. 3. kurangnya kerja sama baik antara aparat kampung maupun dengan masyarakat. 4. Kurangnya partisipasi masyarakat. Respon masyarakat selalu mendukung apa yang menjadi kegiatan dari pemerintah, tetapi ada juga yang tidak mau terlibat dalam pembangunan. Respon selaku pemerintah selalu melakukan komunikasi dengan masyarakat. Pemerintah terus berusaha untuk membangun kebersamaan dengan masyarakat agar pembangunan dapat berjalan dengan adanya dukungan dari masyarakat.

**Kata Kunci:** Pola Komunikasi, Pembangunan, Desa

## VILLAGE GOVERNMENT COMMUNICATION PATTERNS IN THE DEVELOPMENT OF AUTAKMA VILLAGE, WAMENA DISTRICT, JAYAWIJAYA DISTRICT

### Abstract

The research aims to explore the communication patterns of the village government in the development of Autakma Village, Wamena Kota District, Jayawijaya Regency. The study utilizes a qualitative method with purposive sampling to determine data sources. Data collection techniques include observation, interviews, documentation, and literature review. Findings indicate that the government communicates with the community using both Indonesian and local languages, with a preference for the latter. Technologies such as computers, telephones,



WhatsApp, and the internet are employed in communication. Various media, including mobile phones, WhatsApp, written correspondence, and direct oral communication, are used to engage with the community. Obstacles identified include: 1. Insufficient communication with village officials or apparatus. 2. Limited communication with the local community. 3. Lack of effective collaboration between village officials and the community. 4. Limited community participation. Despite challenges, community responses generally support government activities; however, some individuals may choose not to engage in the development process. The government consistently communicates with the community and strives to foster unity to ensure development proceeds with community support.

**Keywords: Communication Patterns, Development, Village**

## **Pendahuluan**

Kegiatan pembangunan nasional merupakan suatu usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Untuk mewujudkan hal itu diperlukan adanya peningkatan kualitas manusia melalui program-program pembangunan. Pembangunan dilaksanakan berdasarkan rencana besar bangsa Indonesia melalui perencanaan nasional, Provinsi, kabupaten, dan Kampung.

Dalam melakukan perencanaan pembangunan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional (SPPN) secara legal menjamin aspirasi masyarakat dalam kesatuan dengan kepentingan politis (keputusan pembangunan yang ditetapkan oleh legislatif) maupun kepentingan teknokratis (perencanaan pembangunan yang dirumuskan oleh birokrasi) (2004). Aspirasi dan kepentingan masyarakat ini dirumuskan melalui proses perencanaan partisipatif yang secara legal menjamin kedaulatan rakyat dalam berbagai program/proyek pembangunan Kampung. Perencanaan partisipatif yang terpadukan dengan perencanaan teknokratis dan politis menjadi wujud nyata kerja sama pembangunan antara masyarakat dan pemerintah (Soetomo, 2009)

Pemerintah pada saat ini telah melakukan perbaikan-perbaikan pembangunan di berbagai sektor pembangunan, sebagai usaha dalam pencapaian tujuan Negara. Kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan pada hakikatnya merupakan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang selaras dengan pembangunan nasional yang menyangkut segala aspek kehidupan masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang merata, khususnya di Kampung, diperlukan peningkatan inisiatif dan partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan. Pembangunan bukan semata-mata tugas pemerintah saja, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat, baik secara fisik maupun moneter (Mutiarin, Pola Komunikasi Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014-2018, 2020).

Tujuan pembangunan masyarakat adalah perbaikan kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat, sehingga kemiskinan dan lingkungan hidup masyarakat mengalami perubahan. Lahirnya Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, kemudian direvisi menjadi Undang-undang No. 23 Tahun 2014, merupakan langkah baru untuk membenahi penyelenggaraan pemerintah melalui otonomi dan desentralisasi yang diharapkan mampu melahirkan partisipasi aktif masyarakat dan menumbuhkan kemandirian pemerintahan daerah (2014). Dalam pembangunan, partisipasi masyarakat perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh pihak lain, seperti pemerintah Kampung, sehingga dengan adanya keterlibatan pemerintah Kampung besar, masyarakat akan merasa diberi peluang atau kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan. Masyarakat sebagai objek pembangunan berarti terkena langsung atas kebijakan dan kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, perlu melibatkan masyarakat baik dalam formulasi

kebijakan maupun aplikasi kebijakan tersebut, karena mereka yang lebih mengenal kondisi lingkungan mereka.

Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk, mulai dari keikutsertaan langsung dalam program pemerintahan hingga bentuk tidak langsung, seperti sumbangan dana, tenaga, pikiran, atau pendapat dalam pembuatan kebijakan pemerintah (Bokau Nirwana, 2013). Ragam dan tingkat partisipasi sering kali ditentukan secara massal, yaitu dari banyaknya individu yang dilibatkan. Partisipasi masyarakat pada hakikatnya akan berkaitan erat dengan akses masyarakat terhadap informasi. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah, daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa sendiri, sesuai dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Kebijakan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, hingga pengawasan (Hasan, 2010). Salah satu kunci kelancaran pembangunan di Kampung adalah peran komunikasi pemerintahan, dalam hal ini kepala Kampung, untuk menyampaikan berbagai informasi tentang kebijakan pembangunan kepada masyarakat agar mereka turut serta aktif dalam pembangunan tersebut. Penyebaran informasi pembangunan saat ini dapat dilakukan melalui berbagai media komunikasi, baik tradisional maupun modern, dengan tetap memperhatikan efektivitasnya (Mutiarin, 2020).

Penelitian sebelumnya tentang pola komunikasi pemerintahan Desa dalam pembangunan Desa telah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti Riyadi dan Ade Chandra (2022), Pertiwi dan Siregar (2022), serta Nuruzzaman (2016) (Riyadi, 2022). Penelitian ini diinisiasi untuk melihat pola komunikasi dalam pembangunan Kampung. Melalui observasi awal, penulis menemukan beberapa permasalahan yang menyebabkan pembangunan di Kampung Autakma, Distrik Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya, belum terlaksana secara optimal. Minimnya pembangunan tersebut sangat berdampak pada masyarakat dalam segi ekonomi, sosial, dan sumber daya manusia, terutama terkait fasilitas pendidikan dasar yang minim. Selain itu, terdapat kurangnya komunikasi antara pemerintah Kampung dengan masyarakat, sehingga menyebabkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak maksimal.

Penelitian ini mengambil fokus penelitian yaitu Pola Komunikasi Pemerintah Kampung Dalam Pembangunan Kampung Autakma, Distrik Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Pola Komunikasi Pemerintah Kampung Dalam Pembangunan Kampung Autakma, Distrik Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya. Harapannya Diharapkan akan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam mengkaji Pola Komunikasi Pemerintah Kampung Dalam Pembangunan Kampung Autakma, Distrik Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya. Serta Dapat menjadi bahan informasi mengenai Pola Komunikasi Pemerintah Kampung Dalam Pembangunan Kampung Autakma, Distrik Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya. Diharapkan menjadi bahan evaluasi dan kajian bagi pemerintah Kabupaten Dan Kampung Dala menganalisis Pola Komunikasi Pemerintah Kampung Dalam Pembangunan Kampung.

## Metode Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Kampung Autakma, Distrik Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya. Kampung Autakma dipilih sebagai tempat penelitian untuk memperoleh data yang relevan dengan pola komunikasi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan kampung. Waktu yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah selama  $\pm 2$  (dua) bulan. Proses penelitian akan dilakukan dengan cermat selama periode ini untuk memastikan pengumpulan data yang mendalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada tujuan penelitian, yaitu untuk mengeksplorasi dan memahami pola komunikasi pemerintah Kampung Autakma, Distrik Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya, dalam konteks pelaksanaan pembangunan kampung.

Penentuan sumber data dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Informan yang dipilih dianggap memiliki pengetahuan mendalam dan dapat dipercaya sebagai sumber data yang solid. Informan dalam penelitian ini mencakup: Kaur Pembangunan, Ketua Badan Musyawarah Kampung, Anggota Badan Musyawarah Kampung, Perwakilan Pemuda (1 Orang), Masyarakat (1 Orang).

Data Primer: Diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan masyarakat dan perwakilan Pemerintah Kampung Autakma. Data Sekunder: Merupakan data yang diolah dari penelitian terdahulu, mencakup tabel, grafik, diagram, dan sumber informasi lain yang melengkapi data primer. Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara. Pedoman wawancara digunakan untuk memandu proses interaksi dengan informan, memastikan pengumpulan data yang relevan, dan membentuk struktur wawancara. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara berkelanjutan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiono, 2011).

## **Hasil Dan Pembahasan**

Dalam penelitian Pola Komunikasi Pemerintah Kampung Dalam Pembangunan Kampung Autakma, Distrik Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya melalui indikator indikator yaitu: Pola Komunikasi Primer, Pola Komunikasi Sekunder, Pola Komunikasi Linier, dan Pola Komunikasi Sekular. Data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis selanjutnya dilakukan pembahasan yaitu sebagai berikut:

### **Pola Komunikasi Primer**

Proses penyampaian komunikasi dalam pembangunan Desa Autakma, Distrik Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya yaitu Kepala kampung menyampaikan kepada masyarakat tentang pembagian dana kampung dan pembangunan kantor kampung seperti perehapan pagar kantor kampung. Kinerja aparatur pemerintah kampung autakma selalu terkontrol dan bekerja sama. Pemerintah bekerja berdsarakan fungsi dan tugas sesuai struktur, sehingga pelaksanaan pemerintah dijalankan secara organisasi tidak berdasarkan kehendak sendiri. Komunikasi kerja dilakukan secara internal pemerintah maupun kepada BMK. Komunikasi kerja umumnya dilaporkan kepada pemerintah distrik. Komunikasi tidak harus dari dalam saja, tetapi juga dari luar dan tidak harus dari atas tapi juga dari bawah. Komunikasi kerja sangat penting guna penyelesaian kerja dapat selesai tepat waktu. Dengan demikian pemerintah Kampung Autakma selalu bekerja sama, sehingga pekerjaan dapat terkontrol, berjalan lanjut, tertip, dan tepat waktu. Proses penyampaian komunikasi dalam pembangunan sebelum pencairan dana kampung sudah ada perencanaan pembangunan.

Dalam berkomunikasi dengan masyarakat pemerintah menggunakan bahasa Indonesia dan daerah. Pemerintah kampung menggunakan bahasa Indonesia, namun lebih sering menggunakan bahasa daerah karena ada masyarakat yang sudah berpendidikan dan belum berpendidikan. Selain itu karena masyarakat terutama orang tua kurang mengerti, maka sering digunakan bahasa daerah. Kampung Autakma masyarakatnya masih sangat kuat adat-istiadatnya sehingga sering menggunakan bahasa daerah.

### **Pola Komunikasi Sekunder**

Dalam melaksanakan komunikasi pembangunan Desa Autakma, Distrik Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya sudah menggunakan teknologi seperti komputer, lewat telfon, lewat WA dan jaringan internet. Media yang digunakan untuk berkomunikasi pelaksanaan pembangunan Desa Autakma, Distrik Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya sering digunakan seperti HP, lewat WA, melalui surat menyurat, dan melalui secara lisan langsung kepada masyarakat. Pemerintah

kampung belum memiliki komputer. Biasanya laporan pertanggung jawaban dana kampung dibuat menggunakan laptop atau penyedia layanan foto copy.

Lama waktu yang digunakan untuk berkomunikasi pelaksanaan pembangunan Desa Autakma, Distrik Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya, waktunya tidak terlalu lama mungkin 1 atau 2 jam. Untuk pembangunan rehap pagar Kampung Autakma kiranya dilakukan 1 bula dengan melibatkan masyarakat itu bisa dilakukan. Pemerintah kampung melaksanakan pembahasan secara internal dan hasilnya langsung disampaikan kepada masyarakat biasanya bervariasi waktu yang tepat untuk itu waktu biasanya 1 bulan.

### **Pola Komunikasi Linear**

Untuk merencanakan komunikasi pembangunan dilakukan dengan menyusun jadwal pertemuan dengan melibatkan masyarakat dan tokoh-tokoh gereja untuk membicarakan pembangunan kampung apa yang akan dilaksanakan. Hambatan dalam melaksanakan komunikasi pembangunan yaitu: 1. Kelemahan kepala kampung yaitu kurangnya komunikasi dengan bawahan atau aparat kampung. 2. Kurangnya komunikasi dengan masyarakat setempat, maka pembangunan kurang nampak dan perumahan masyarakat banyak masih rumah adat atau menggunakan honai. 3. Kurangnya kerja sama baik antara aparat kampung maupun dengan masyarakat. 4. Kurangnya partisipasi masyarakat. Dengan demikian, komunikasi antara pemerintah kampung dengan masyarakat belum berjalan efektif.

### **Pola Komunikasi Sekuler**

Respons atau tanggapan masyarakat dalam melaksanakan komunikasi pembangunan yaitu masyarakat selalu mendukung apa yang menjadi kegiatan dari pemerintah. Masyarakat Kampung Autakma menginginkan adanya pembangunan rumah bagi masyarakat, penyediaan air bersih, dan fasilitas toilet umum. Di sisi lain masyarakat ada yang mendukung, tetapi ada juga yang tidak mau terlibat dalam pembangunan.

Respons selaku pemerintah desa terhadap tanggapan masyarakat dalam melaksanakan komunikasi pembangunan selaku pemerintah selalu melakukan komunikasi dengan masyarakat. Pemerintah sudah menerima permohonan masyarakat diantaranya perumahan dan air bersih. Namun ketika pencairan dana langsung menghilang dan setelah uang sudah habis baru muncul, maka sangat sulit untuk kemajuan pembangunan. Pemerintah terus berusaha untuk membangun kebersamaan dengan masyarakat agar pembangunan dapat berjalan dengan adanya dukungan dari masyarakat.

### **Kesimpulan**

Proses penyampaian komunikasi dalam pembangunan Desa Autakma, Distrik Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya yaitu Kepala Kampung menyampaikan kepada masyarakat tentang pembagian dana kampung dan pembangunan kantor kampung. Dalam berkomunikasi dengan masyarakat pemerintah menggunakan bahasa Indonesia, namun lebih sering menggunakan bahasa daerah. Dalam melaksanakan komunikasi pembangunan Desa sudah menggunakan teknologi seperti komputer, lewat telepon, lewat WA dan jaringan internet. Media yang digunakan untuk berkomunikasi yaitu HP, lewat WA, melalui surat menyurat, dan melalui secara lisan langsung kepada masyarakat. Lama waktu yang digunakan untuk berkomunikasi dimulai dari Pemerintah kampung melaksanakan pembahasan secara internal dan hasilnya disampaikan kepada masyarakat diperlukan waktu 1 bulan.

Hambatan dalam melaksanakan komunikasi pembangunan yaitu: 1. Kelemahan kepala kampung yaitu kurangnya komunikasi dengan bawahan atau aparat kampung. 2. Kurangnya komunikasi dengan masyarakat setempat, maka pembangunan kurang nampak dan perumahan

masyarakat banyak masi rumah adat atau menggunakan honai. 3. kurangnya kerja sama baik atara aparat kampung maupun dengan masyarakat. 4. Kurangnya partisipasi masyarakat. Renspons atau tanggapan masyarakat dalam melaksanakan komunikasi pembangunan yaitu masyarakat selalu mendukung apa yang menjadi kegiatan dari pemerintah, tetapi ada juga yang tidak mau terlibat dalam pembangunan. Respon selaku pemerintah desa terhadap tanggapan masyarakat dalam melaksanakan komunikasi pembangunan selaku pemerintah selalu melakukan komunikasi dengan masyarakat. Pemerintah terus berusaha untuk membangun kebersamaan dengan masyarakat agat pembangunan dapat berjalan dengan adanya dukungan dari masyrakat.

## Referensi

### **2004, U.-U. N. (n.d.). tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).**

2014, U.-U. N. (n.d.). perubahan atas Undang-undang No 32 Tahun 2024 tentang pemerintahan Daerah.

Bokau Nirwana, I. (2013). Peran Komunikasi Pemerintahan Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Boyongan Atas (Studi Peran Kepala Desa). *Jurnal Acta Diurna Komunikasi. Vol 2 (3)*.

Hasan, E. (2010). *Paradigma Komunikasi Pemerintahan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Mutiarin, D. d. (2020). Pola Komunikasi Pemerimtahan Kabupaten Kulon Progo Dalam Merningkatkan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014-2018. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STLA Mataram. Vol 6 (2)*.

Mutiarin, D. d. (2020). Pola Komunikasi Pemerimtahan Kabupaten Kulon Progo Dalam Merningkatkan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014-2018. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STLA Mataram. Vol 6 (2)*.

Riyadi, I. d. (2022). Pola Komunikasi Pemerintah Kalurahan Baturemo, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul , Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Masyarakat dan Kampung. Vol 2 (1)*.

Soetomo. (2009). *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiono. (2011). *Metode Penelitian Kombinasi*. . Yogyakarta: Alfabeta.